

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666233-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601854-30012024154759

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

dewisincia@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-30 15:47:59



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jalan Raya Kapal, Link Muncan, Kec. Mengwi, Kab. Badung

Nomor Telepon : (0361) 4427552

Penjelasan Umum : Berdirinya PT.BPR MITRA BALI MANDIRI adalah untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah serta berfungsi sebagai intermediasi agar bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, risiko bisnis yang dihadapi juga berkembang secara luas yang diantaranya mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan dan lain sebagainya. Dalam rangka meminimalkan risiko kerugian, maka PT.BPR MITRA BALI MANDIRI dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko yang ditetapkan dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dengan diberlakukannya POJK No 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR diwajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik (best practice) dengan berazaskan pada 5 (lima) pilar Good Corporate Governance, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan Keterbukaan (TARIF).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|----|---------------------------|--|---|
| 1 | Dewa Nyoman Artaning Dita | Direktur Utama | 1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance atau tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang operasional berdasarkan prinsip kehati-hatian 2. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya 3. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham 4. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris |
| 2 | Ely Yulianti | Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan | 1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank 2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi 3. Menetapkan Sistem dan Prosedur Kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman Internal Bank 4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan 5. Melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR |

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Footer 1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|----|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | Drs I Gusti Agung Anom Harsana Ak | Komisaris Utama dan Independen | Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance atau tata kelola yang baik. dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam: a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. c. Benturan kepentingan. d. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern. e. Penerapan fungsi Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern. f. Batas Maksimum Pemberian Kredit. g. Rencana Bisnis. h. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank |
| 2 | I Wayan Suandiana,BA | Komisaris | Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern. |

Rekomendasi Kepada Direksi

Agar Selalu disempurnakan dan dilakukan evaluasi secara berkesinambungan dalam pelaksanaan dan penerapan tata kelola

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan | | |
|----|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | Ely Yulianti | Ely Yulianti | tidak ada | tidak ada |
| 2 | Dewa Nyoman Artaning Dita | Dewa Nyoman Artaning Dita | tidak ada | tidak ada |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga | | |
|----|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | Dewa Nyoman Artaning Dita | Dewa Nyoman Artaning Dita | tidak ada | tidak ada |
| 2 | Ely Yulianti | Ely Yulianti | tidak ada | tidak ada |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | | | |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan | | |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1 | Drs I Gusti Agung Anom Harsana Ak | Drs I Gusti Agung Anom Harsana Ak | tidak ada | tidak ada |
| 2 | I Wayan Suandiana,BA | I Wayan Suandiana BA | tidak ada | tidak ada |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga | | |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1 | Drs I Gusti Agung Anom Harsana Ak | Drs I Gusti Agung Anom Harsana Ak | tidak ada | tidak ada |
| 2 | I Wayan Suandiana,BA | I Wayan Suandiana BA | tidak ada | tidak ada |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi | | Dewan Komisaris | |
|----|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1 | Gaji | 2 | 326875000 | 2 | 122900000 |
| 2 | Tunjangan | 2 | 14400000 | 2 | 19200000 |
| 3 | Tantiem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kompensasi berbasis saham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Remunerasi lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | | 341275000 | | 142100000 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) | |
|----|--------------------------------------|--|-----------------|
| | | Direksi | Dewan Komisaris |
| 1 | Perumahan | tidak ada | tidak ada |
| 2 | Transportasi | Mobil Dinas | tidak ada |
| 3 | Asuransi Kesehatan | tidak ada | tidak ada |
| 4 | Fasilitas lainnya | tidak ada | tidak ada |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Keterangan | Perbandingan | |
|----|--|--------------|---|
| | | (a/b) | 1 |
| 1 | Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) | 2,61 | 1 |
| 2 | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) | 1,34 | 1 |
| 3 | Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,47 | 1 |
| 4 | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b) | 2,59 | 1 |
| 5 | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b) | 3,45 | 1 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan |
|----|---------------|----------------|---------------------------|
| 1 | 12-01-2023 | 21 | Rapat Evaluasi |
| 2 | 10-03-2023 | 24 | Rapat Evaluasi |
| 3 | 14-03-2023 | 4 | Rapat Direksi & Komisaris |
| 4 | 06-04-2023 | 12 | Rapat Marketing |
| 5 | 29-05-2023 | 14 | Rapat Evaluasi |
| 6 | 12-06-2023 | 21 | Rapat Evaluasi |
| 7 | 10-07-2023 | 4 | Rapat Direksi & Komisaris |
| 8 | 15-07-2023 | 12 | Rapat Marketing |
| 9 | 01-09-2023 | 4 | Rapat Direksi & Komisaris |
| 10 | 07-11-2023 | 4 | Rapat Direksi & Komisaris |
| 11 | 24-11-2023 | 21 | Rapat Evaluasi/ RBB |
| 12 | 28-12-2023 | 10 | Rapat Marketing |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----|-----------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1 | Drs I Gusti Agung Anom Harsana Ak | 12 | 0 | 100,00 |
| 2 | I Wayan Suandiana,BA | 12 | 0 | 100,00 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Anggota Direksi | | Anggota Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan |
| Total Fraud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah Diselesaikan | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Permasalahan Hukum | Jumlah (satuan) | |
|--|-----------------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0 | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | Jumlah (Rp) |
|----|---------------------|---------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| 1 | 20230213 | Kegiatan Sosial | Sumbangan parcel kary melahirkan | Ni Desak Made Rina A | 200.000 |
| 2 | 20230221 | Kegiatan Sosial | Sumbangan Sponsorship Sekolah | Prima School | 1.500.000 |
| 3 | 20230320 | Kegiatan Sosial | Sumbangan Keamanan Nyepi | Pecalang Br. Muncan Kapal | 200.000 |
| 4 | 20230426 | Kegiatan Sosial | Sumbangan Potong gigi anak Direksi | Dewa Nyoman Artaning Dita | 500.000 |
| 5 | 20230503 | Kegiatan Sosial | Sumbangan Desa Adat Kapal | Desa Adat Kapal | 200.000 |
| 6 | 20230522 | Kegiatan Sosial | Sumbangan Partisipan HUT Jamkrida | Jamkrida Bali | 500.000 |
| 7 | 20230712 | Kegiatan Sosial | Sumbangan Dana Punia Piodalan | Br. Muncan Kapal | 150.000 |
| 8 | 20230804 | Kegiatan Sosial | Sumbangan Jenguk Anak Karyawan | NI Ketut Budiasih | 61.500 |
| 9 | 20230809 | Kegiatan Sosial | Sumbangan pernikahan karyawan | Ni Kadek Sri Lisa F | 1.000.000 |
| 10 | 20230918 | Kegiatan Sosial | Sumbangan Uang Duka Direksi Mitra Muktijya | Kel. Dewa Ayu Eka A | 1.000.000 |
| 11 | 20231003 | Kegiatan Sosial | Sumbangan Pembelian Piala | Prima School | 609.240 |
| 12 | 20231020 | Kegiatan Sosial | Sumbangan Pernikahan anak Dekom | I Gst Agung Anom Harsana | 500.000 |
| 13 | 20231124 | Kegiatan Sosial | Sumbangan kenang2an karyawan | Ni Putu Evi Damayanti | 356.000 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

| | |
|----------------------|---|
| Nama BPR | : PT. BPR Mitra Bali Mandiri |
| Posisi Laporan | : 31-12-2023 |
| Alamat | : Jl Raya Kapal Br. Muncan Kel. Kapal Kec. Mengwi Badung Bali |
| Nomor Telepon | : (0361)-4427552 |
| Modal Inti BPR | : 1.343.332.705,00 |
| Total Aset BPR | : 23.812.513.560,00 |
| Bobot BPR | : B |
| Status Audit Ekstern | : Diaudit |
| Nilai Komposit | : 2,2 |
| Peringkat Komposit | : 2 |
| Analisis | : Penerapan GCG yang secara umum baik sesuai dengan hasil penilaian tersebut, meskipun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan GCG. Atas kelemahan dari prinsip-prinsip GCG yang masih harus diperbaiki yaitu : a. dalam proses pemberian kredit BPR kepada pihak terkait maupun tidak terkait dan pemberian kredit besar masih perlu ditingkatkan prinsip kehati-hatian, kelemahannya dalam faktor analisa dan kelengkapan berkas kredit. Terkait dengan hal ini Bank akan melakukan perbaikan analisa dan melengkapi kelengkapan berkas kredit dan bukti pendukung. b. Tidak terdapat pelanggaran BMPK pada periode 2023 akan tetapi terdapat pelampuan BMPK dikarenakan penurunan modal BPR dan telah dibuatkan action plan ke OJK. Terhadap nilai komposit yang diperoleh Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank dapat lebih baik, antar lain pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank yang menyangkut aspek Governance struktur, aspek Governance Proses dan aspek governance outcome. Kultur GCG yang telah terbentuk dalam organisasi Bank dimana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu. |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Faktor | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan |
|--|--------------|----------|--------|-------|-----------------------|------------------------|---|
| Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi | 0,200 | 0,75 | 0,80 | 0,20 | 1,75 | 0.350 | Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. |
| Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris | 0,150 | 0,72 | 0,75 | 0,10 | 1,57 | 0.236 | Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta mampu bertindak secara independen |
| Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.000 | Nihil |
| Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan | 0,100 | 1,50 | 1,20 | 0,20 | 2,90 | 0.290 | Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif |
| Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR | 0,100 | 1,10 | 1,20 | 0,33 | 2,63 | 0.263 | Kepatuhan Bank tergolong baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat |
| Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern | 0,100 | 1,20 | 0,80 | 0,25 | 2,25 | 0.225 | Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin. |
| Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern | 0,025 | 1,00 | 0,80 | 0,20 | 2,00 | 0.050 | Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. |
| Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern | 0,100 | 1,34 | 1,20 | 0,25 | 2,79 | 0.279 | Penerapan Manajemen Resiko sudah cukup memadai, perlu lebih ditingkatkan dalam memantau Resiko-resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang agar penanganan lebih dini bisa dilakukan. |
| Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit | 0,075 | 1,50 | 0,80 | 0,25 | 2,55 | 0.191 | Tidak terdapat pelanggaran BMPK dan Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cukup baik. |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Faktor | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan |
|---|--------------|----------|--------|-------|--------------------------|---------------------------|---|
| Faktor 10: Rencana bisnis BPR | 0,075 | 1,17 | 0,80 | 0,20 | 2,17 | 0.163 | Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris sesuai Visi dan Misi Perusahaan. Cakupan rencana bisnis telah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. |
| Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal | 0,075 | 1,00 | 0,80 | 0,20 | 2,00 | 0.150 | Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. |
| Nilai Komposit | | | | | | 2.2 | |
| Peringkat Komposit | | | | | | Baik | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|--|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. | 1 | Jumlah Direksi 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sbg Direktur yg membawahkan fungsi kepatuhan |
| 2 | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | 2 | 1 Anggota direksi tinggal di kota yang sama dan 1 anggota direksi tinggal di kota/kabupaten yg berbeda pada provinsi yg sama |
| 3 | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan). | 1 | seluruh anggota direksi tidak merangkap jabatan |
| 4 | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. | 1 | seluruh anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris |
| 5 | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud. | 2 | Direksi hanya menggunakan jasa konsultan pengacara untuk menangani kredit bermasalah dengan SPK yg jelas |
| 6 | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya. | 2 | seluruh anggota direksi telah lulus uji kemampuan dan diangkat melalui RUPS |
| | Total nilai skala penerapan | 9 | |
| | Rata-rata | 1,50 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,75 | |

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|--|
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 7 | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. | 2 | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen |
| 8 | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. | 2 | Direksi menindaklanjuti setiap temuan audit intern maupun extern |
| 9 | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. | 2 | Direksi menyediakan laporan untuk dewan komisaris |
| 10 | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | 2 | keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat |
| 11 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | 2 | Direksi hanya menerima benefit sesuai dengan yg ditetapkan di RUPS |
| 12 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | 2 | Direksi mengikut sertakan pegawai BPR dalam pendidikan/Pelatihan yg diselenggarakan oleh pihak intern maupun ekstern |
| 13 | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian. | 2 | Keterangan |
| 14 | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. | 2 | sudah terlaksana |
| | Total nilai skala penerapan | 16 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 15 | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. | 1 | Selalau dilakukan dalam RUPS Tahunan |
| 16 | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. | 2 | dilakukan sosialisasi |
| 17 | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi. | 2 | sudah dibuatkan risalah rapat |
| 18 | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | 3 | selalu diusahakan peningkatan dalam hal tersebut |
| 19 | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan. | 2 | Sudah dilaksanakan |
| | Total nilai skala penerapan | 10 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang. | 1 | Dewan komisaris berjumlah 2 (dua) orang |
| 2 | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. | 1 | jumlah dewan komisaris sama dengan jml direksi |
| 3 | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. | 2 | Dewan komisaris telah lulus uji kemampuan dan diangkat melalui RUPS |
| 4 | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | 1 | seluruh anggota komisaris bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama |
| 5 | BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | Seluruh dewan komisaris adalah komisaris independen |
| 6 | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. | 2 | dewan komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja |
| 7 | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. | 1 | dewan komisaris tdk merangkap jabatan lebih dari 2 BPR |
| 8 | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. | 1 | dewan komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan direksi dan komisaris yg lain |

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|---|
| 9 | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. | 2 | dewan komisaris adalah independen dan tidak memiliki hubungan keuangan dengan pihak pemegang saham maupun direksi |
| | Total nilai skala penerapan | 13 | |
| | Rata-rata | 1,44 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,72 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 10 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. | 2 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan tsb |
| 11 | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. | 2 | Telah dilakukan |
| 12 | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. | 2 | Sudah sesuai |
| 13 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. | 2 | Telah dilakukan |
| 14 | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. | 1 | Telah dilakukan |

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|-----------------|
| 15 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | 2 | Telah dilakukan |
| 16 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | 2 | Sudah sesuai |
| 17 | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. | 2 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 15 | |
| | Rata-rata | 1,88 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,75 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 18 | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. | 1 | Telah dilakukan |
| | Total nilai skala penerapan | 1 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,10 | |

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. | 0 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 0 | |
| | Rata-rata | 0,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 1 | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. | 0 | Keterangan |
| 2 | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. | 0 | Keterangan |
| 3 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | 0 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 0 | |
| | Rata-rata | 0,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,00 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 1 | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR. | 0 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 0 | |

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
| | Rata-rata | 0,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,00 | |

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. | 3 | Bank telah memiliki SOP benturan kepentingan dan akan selalu disempurnakan |
| | Total nilai skala penerapan | 3 | |
| | Rata-rata | 3,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,50 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. | 3 | setuju |
| | Total nilai skala penerapan | 3 | |
| | Rata-rata | 3,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 1,20 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 3 | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. | 2 | setuju |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p> | 1 | Modal inti BPR kurang dari 50 M |
| 2 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. | 3 | pemahaman peraturan selalu ditingkatkan |
| 3 | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> | 2 | Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan |
| 4 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. | 3 | PE melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur dan perlu ditingkatkan |
| 5 | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. | 2 | Sudah ada |
| | Total nilai skala penerapan | 11 | |
| | Rata-rata | 2,20 | |
| | Bobot | 0,50 | |

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|---|
| | Nilai struktur | 1,10 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 6 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. | 3 | setuju |
| 7 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. | 3 | sudah dilakukan sosialisasi |
| 8 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 3 | sudah dilakukan |
| 9 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 3 | sudah dilakukan dgn mengikuti sosialisasi apabila ada aturan2 yang baru |
| 10 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 3 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 15 | |
| | Rata-rata | 3,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 1,20 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 11 | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. | 3 | Keterangan |

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
| 12 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. | 4 | Keterangan |
| 13 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 3 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 10 | |
| | Rata-rata | 3,33 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,33 | |

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. | 1 | BPR dg modal inti dibawah 50 M telah memiliki PE audit intern |
| 2 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. | 3 | sudah sesuai |
| 3 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana). | 2 | sudah sesuai |
| 4 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. | 2 | sudah dilaksanakan |
| 5 | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern. | 4 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 12 | |
| | Rata-rata | 2,40 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,20 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 6 | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. | 2 | sudah sesuai |

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--------------------|
| 7 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | Keterangan |
| 8 | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. | 2 | sudah sesuai |
| 9 | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. | 2 | sudah dilaksanakan |
| | Total nilai skala penerapan | 8 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 10 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. | 2 | sudah sesuai |
| 11 | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 4 | sudah dilaporkan |
| 12 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | Keterangan |

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|-----------------|
| 13 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | sudah dilakukan |
| | Total nilai skala penerapan | 10 | |
| | Rata-rata | 2,50 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,25 | |

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------------------------------|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. | 2 | sudah sesuai |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. | 2 | sudah sesuai |
| 3 | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | sudah dilaporkan langsung oleh KAP |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 4 | Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. | 2 | sudah sesuai |
| 5 | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | sudah sesuai |

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p> | 2 | BPR telah menunjuk PE Manajemen Risiko |
| 2 | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. | 3 | Bank sudah memiliki SOP MR |
| 3 | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. | 3 | akan sll disempurnakan |
| | Total nilai skala penerapan | 8 | |
| | Rata-rata | 2,67 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,34 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 4 | <p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p> | 3 | sudah dilakukan |

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|---------------------------|
| 5 | Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. | 3 | sudah dilakukan |
| 6 | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material. | 3 | sudah dilakukan |
| 7 | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. | 4 | sudah dilakukan |
| 8 | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 3 | sudah dilakukan |
| 9 | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | 2 | Keterangan |
| 10 | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. | 3 | akan selalu disempurnakan |
| | Total nilai skala penerapan | 21 | |
| | Rata-rata | 3,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 1,20 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 11 | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | sudah dilakukan |
| 12 | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 3 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 5 | |
| | Rata-rata | 2,50 | |
| | Bobot | 0,10 | |

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
| | Nilai Hasil | 0,25 | |

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | 3 | sudah tercantum di SOP kredit |
| | Total nilai skala penerapan | 3 | |
| | Rata-rata | 3,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,50 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. | 2 | sudah dilakukan |
| 3 | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. | 2 | sudah dilakukan |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 4 | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | sudah dilakukan |
| 5 | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 3 | Terdapat pelampauan BMPK dan sdh dibuatkan action plan dan disampaikan ke OJK |

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|
| | Total nilai skala penerapan | 5 | |
| | Rata-rata | 2,50 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,25 | |

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|-----------------|--------------------|
| A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | |
| 1 | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. | 2 | sudah sesuai |
| 2 | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 3 | sudah sesuai |
| 3 | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. | 2 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 7 | |
| | Rata-rata | 2,33 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,17 | |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | |
| 4 | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. | 2 | sudah sesuai |
| 5 | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. | 2 | sudah dilaksanakan |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | |

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|--------------------|
| 6 | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | sudah dilaksanakan |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|-----------------|--------------------|
| A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | |
| 1 | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | 2 | sudah sesuai |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,00 | |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | |
| 2 | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | sudah sesuai |
| 3 | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | sudah sesuai |
| 4 | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | sudah sesuai |
| 5 | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | sudah dilaksanakan |
| | Total nilai skala penerapan | 8 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | |

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--------------------|
| 6 | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | sudah dilaksanakan |
| 7 | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. | 2 | sudah sesuai |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jalan Raya Kapal, Link Muncan, Kec. Mengwi, Kab. Badung

Nomor Telepon : (0361) 4427552

Penjelasan Umum : Berdirinya PT.BPR MITRA BALI MANDIRI adalah untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah serta berfungsi sebagai intermediasi agar bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, risiko bisnis yang dihadapi juga berkembang secara luas yang diantaranya mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan dan lain sebagainya. Dalam rangka meminimalkan risiko kerugian, maka PT.BPR MITRA BALI MANDIRI dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko yang ditetapkan dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dengan diberlakukannya POJK No 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR diwajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik (best practice) dengan berazaskan pada 5 (lima) pilar Good Corporate Governance, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan Keterbukaan (TARIF).

KESIMPULAN

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

| Faktor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nilai Komposit |
|------------------------|------|-------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Total Penilaian Faktor | 0,35 | 0,236 | - | 0,29 | 0,263 | 0,225 | 0,050 | 0,279 | 0,191 | 0,163 | 0,150 | 2,2 |
| Predikat Komposit | BAIK | | | | | | | | | | | |

Sesuai POJK No. 04/POJK.03/2015 dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 Perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, diwajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik (*best practice*) dengan berazaskan pada 5 (lima) pilar dalam *Good Corporate Governance* yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan *Fairness/* keterbukaan (TARIF).

Penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum dengan baik sesuai dengan hasil penilaian tersebut diatas, meskipun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan GCG.

Atas kelemahan dari prinsip-prinsip GCG yang masih harus di perbaiki yaitu:

1. Tidak terdapat kelemahan yang signifikan dari segi Struktur dan Infrastruktur penerapan tata kelola sebagian besar telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Proses pemberian kredit BPR kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit besar masih diperlukan prinsip kehati-hatian. Kelemahan di antaranya adalah faktor analisa dan kelengkapan berkas kredit. Terkait dengan hal ini Bank akan melakukan perbaikan analisa dan melengkapi kelengkapan berkas kredit dan bukti pendukung.
3. Tidak terdapat pelanggaran BMPK pada periode 2023 tetapi terdapat Pelampauan BMPK karena kerugian yang menyebabkan penurunan komposisi Modal

Terdapat nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank dapat lebih baik, antara lain pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank yang menyangkut Aspek *Governance Struktur*, Aspek *Governance Proses*, dan Aspek *Governance Outcome*.

Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.



Dewa Nyoman Artaning Dita
Direktur Utama

PT BPR MITRA BALI MANDIRI



PT. BANK PERKREDITAN RAGYAT
MITRA BALI MANDIRI
Jl. Jend. Sudirman No. 100, Denpasar, Bali
No. POKJ.03/2015, 04/2015, 24/2020, 5/2016



Ely Yulianti
Direktur